



Kewarganegaraan dan Nasionalisme: Tantangan Implementasi Nilai Pancasila (Berdasarkan kasus Pindahnya WNI menjadi WNA)

Syahraturasywa Nur Fadhilah¹, NurYulianita², M. Diffa Fahad³, R Muhammad Helmi Abdulhaq⁴

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : syahrataanf@gmail.com¹, yulianitaa067@gmail.com², diffafahad@gmail.com³, radenhaq23@gmail.com⁴

Received : 2024-12-11; Accepted : 2025-01-11; Published : 2025-05-01

Kata Kunci:

*kewarganegaraan,
nasionalisme, Pancasila,
globalisasi, pendidikan*

Abstrak

Fenomena perpindahan kewarganegaraan WNI menjadi WNA dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Penelitian ini menganalisis tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menjaga nasionalisme di era globalisasi. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh dari kajian literatur dan wawancara. Faktor pendorong meliputi kondisi ekonomi yang buruk, minimnya lapangan kerja, dan akses transportasi terbatas, sementara faktor penarik seperti peluang kerja, pendidikan, dan fasilitas lebih baik di negara tujuan menjadi alasan utama. Globalisasi dan pengaruh budaya asing, seperti K-Pop, menyebabkan generasi muda kehilangan identitas nasional. Kurangnya pendidikan nilai-nilai Pancasila turut menurunkan kesadaran bela negara. Hasil penelitian menunjukkan perlunya kebijakan strategis untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan nasionalisme. Dampak positif berupa diaspora yang mengangkat nama baik Indonesia, namun kekurangan SDM menjadi tantangan. Fenomena ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk berbenah dan menciptakan sistem yang lebih inklusif.

Keywords:

*citizenship,
nationalism,
Pancasila,
globalization,
education*

Abstract

The phenomenon of Indonesian citizens (WNI) changing their nationality to foreign citizenship (WNA) is influenced by economic, social, and cultural factors. This study analyzes the challenges of implementing Pancasila values in maintaining nationalism in the globalization era. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through literature reviews and interviews. Push factors include poor economic conditions, limited job opportunities, and inadequate transportation access, while pull factors such as better job prospects, education, and facilities in destination countries are the main reasons. Globalization and foreign cultural influences, such as K-Pop, have led the younger generation to lose their national identity. The lack of education on Pancasila values further reduces national pride and state defense awareness. The study highlights the need for strategic policies to strengthen Pancasila implementation and enhance nationalism. While diaspora brings positive impacts, such as elevating Indonesia's reputation, the lack of skilled human resources poses challenges. This phenomenon serves as a momentum for the government to improve and create an inclusive system.

PENDAHULUAN

Pancasila disebut sebagai dasar negara serta ideologi bangsa yang sangat bergantung kepada kesejahteraan rakyat Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya Warga Negara Indonesia (WNI) tidak seluruhnya bisa menerapkan prinsip tersebut, karena memang dalam penerapannya membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah. Dengan adanya ketidakpuasan terhadap layanan publik, peluang ekonomi, dan stabilitas politik adalah penyebab utama dari fenomena ini (Yulia Rohmawati, 2023). Peristiwa ini, jika dilihat dari sudut pandang Pancasila, hal ini menunjukkan bahwasanya betapa lemah implementasi sila kelima, yakni "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," serta sila ketiga, yakni "Persatuan Indonesia."

Peran Pancasila sebagai dasar negara sangat penting dalam menjaga keutuhan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di setiap silanya mengatur cara pemerintah dan masyarakat untuk saling berinteraksi supaya mencapai tujuan bersama, yakni keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang lebih memilih menjadi warga negara asing. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara nilai-nilai Pancasila dengan kenyataan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh sosiolog dari Universitas Airlangga (UNAIR) menunjukkan bahwasanya sejumlah faktor berkontribusi terhadap kejadian tersebut, ini juga termasuk ketidakpuasan terhadap sistem pelayanan publik yang ada pada bidang ekonomi, dan hukum di Indonesia.

Karena adanya situasi tersebut, dapat menimbulkan keraguan tentang seberapa efektif dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, dengan semakin ketatnya persaingan antar negara dapat menarik sumber daya manusia yang berkualitas tinggi serta dapat menghasilkan lebih banyak kesempatan seperti: pendidikan, pekerjaan, serta jaminan sosial yang lebih baik.

Di sisi lain, hal tersebut adalah kesempatan bagi pemerintah Indonesia supaya mempertimbangkan kebijakan mereka sendiri yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Pancasila yang berfungsi sebagai pedoman hidup bangsa, seharusnya menjadi dasar atau tolak ukur untuk membuat kebijakan yang dapat membantu masyarakat serta dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, peristiwa ini dapat kita gunakan untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pemerintahan.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mengkaji kejadian perpindahan kewarganegaraan WNI dari sudut pandang Pancasila, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan. Data yang dikumpulkan dengan melalui membaca literatur tentang topik penelitian, seperti artikel, jurnal, serta laporan yang resmi. Pertama, identifikasi masalah dilakukan dengan mengamati fenomena perpindahan kewarganegaraan dari WNI ke WNA yang semakin meningkat. Kedua, rumusan masalah disusun untuk menjawab faktor penyebab, dampak terhadap nasionalisme, dan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam fenomena tersebut. Ketiga, kajian literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teori dan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, data dikumpulkan

melalui wawancara dan dokumen resmi, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Akhirnya, kesimpulan dan rekomendasi disusun berdasarkan hasil analisis data.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut dengan cara memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan prinsip nilai-nilai Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam studi kasus yang dibahas dan dari data yang ditemukan faktor faktor pendorong warga negara indonesia (WNI) untuk berpindah kewarganegaraan dari beberapa tahun yang lalu masih banyak yang relevan dengan faktor zaman sekarang, Seperti halnya faktor ekonomi, faktor ini merupakan faktor yang paling jelas tentang bagaimana WNI ingin berpindah kewarganegaraan. Berikut beberapa data yang ditemukan baik wawancara atau dari sumber yang terpercaya.

Kondisi ekonomi yang buruk dan sulitnya transportasi di daerah perbatasan menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk pindah kewarganegaraan ke negara tetangga seperti Malaysia. (Kurniadi Purnomo, 2017). Faktor penarik seperti peluang pekerjaan, pendidikan, dan fasilitas kota yang lebih baik menjadi alasan utama perpindahan WNI menjadi WNA. Tidak hanya dari sudut pandang kondisi ekonomi tetapi Globalisasi dan Modernisasi juga menjadi faktor dalam kasus ini Globalisasi memberikan peluang pendidikan dan karir baru, tetapi juga menyebabkan generasi muda kehilangan identitas budaya dan nasionalisme. (Nadia Restu dkk, 2024).

Faktor selanjutnya yaitu pengaruh budaya asing, dengan adanya pengaruh dari budaya budaya asing yang masuk ke indonesia seperti k-pop ataupun budaya jepang seperti anime dan lain sebagainya, menjadikan generasi muda lebih tertarik untuk menjadi warga negara asing dan rela tidak mempertahankan identitas indonesia faktor ini juga di dukung oleh factor sebelumnya karena memang di indonesia punya kebudayaan yang sangat beragam jadi sulit bagi budaya budaya asing untuk menjadi budaya yang mudah diterima masyarakat tetapi tidak menutup kemungkinan budaya asing bisa merajalela di indonesia karena adanya pengaruh globalisasi yang semakin luas.

Faktor terakhir adalah faktor kurangnya pendidikan nilai nilai pancasila pada generasi muda, dalam hal ini dapat menyebabkan turunya kesadaran bela negara dan rasa kebanggaan terhadap bangsa yang disebabkan jika pendidikan nilai nilai pancasila tidak diterapkan secara optimal (Nadia Restu dkk, 2024).

Dalam hal ini ada beberapa poin penting yang harus bisa diterapkan seperti nasionalisme, dan implementasi nilai nilai pancasila antara lain :

1. Nasionalisme

Nasionalisme, patriotisme, dan bela tanah air merupakan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk menjaga tanah airnya sebagai wujud rasa syukur dan penghargaan atas kekayaan dan kebahagiaan yang diberikan negara ini kepada mereka. (Een Irianti & Rini Hardiyanti, 2024). Nasionalisme tidak hanya datang dari individu dalam suatu masyarakat, tetapi ada juga campur tangan pemerintah. Kondisi

ekonomi yang buruk menyebabkan masyarakat. mengubah kewarganegaraan. (Kurniadi Purnomo, 2017).

Dengan adanya keinginan untuk tetap tinggal menetap bahkan berpindah kewarganegaraan hal ini membuktikan bahwa sikap nasionalisme para remaja mulai memudar yang saat ini tengah diserbu oleh imperialisme budaya asing. (Rona Nada Nisrina & Fatma Ulfatun Najicha, 2022). Dan ada juga tantangan bagi masyarakat perbatasan nasionalisme masyarakat perbatasan seringkali tertindas karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi perekonomian dan pendidikan di wilayah tersebut. (Kurniadhi Purnomo, 2017).

Menghormati bendera Merah Putih dan mempelajari lagu Indonesia Raya merupakan wujud nasionalisme yang harus terus mengakar. (Kurniadhi Purnomo, 2017). Perlawanan nasionalisme adalah keadaan bangsa Indonesia yang teguh dan tangguh dalam menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. (Rona Nada Nisrina & Fatma Ulfatun Najicha, 2022).

2. Kebangsaan

Banyak generasi muda saat ini yang sedang menempuh studi atau berkarir dan bekerja di luar negeri tidak ingin kembali ke tanah air yaitu Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia akan hilang jika keadaan ini terus berlanjut. (Een Irianti & Rini Hardiyanti, 2024). Kondisi kehidupan di negara tetangga lebih baik dibandingkan di negara kita, sehingga menarik banyak orang untuk dengan mudah keluar masuk Malaysia dibandingkan harus ke daerah perbatasan Indonesia. (Kurniadhi Purnomo, 2017).

Banyak remaja mulai membandingkan dan mempertimbangkan untuk tinggal di dalamnya Di Korea Selatan lebih baik dibandingkan di Indonesia. 4 dari 5 remaja pecinta K-Drama mengatakan mereka sangat ingin tinggal dan menetap di Korea Selatan karena berbagai alasan mulai dari budaya, infrastruktur, kondisi perekonomian, keindahan alam, atau bahkan sekedar untuk memuaskan keinginannya untuk bertemu dengan idolanya. (Nadia Restu Utami dkk, 2024). Kurangnya kemampuan menyaring budaya baru menyebabkan banyak generasi muda melupakan budaya asli Indonesia, yang pada akhirnya mengancam rasa nasionalisme. generasi penerus bangsa. (Rona Nada Nisrina & Fatma Ulfatun Najicha, 2022).

3. Penerapan nilai-nilai Pancasila

Kesadaran bela negara di kalangan generasi muda harus dipahami dengan baik, serta bagaimana berperan dan aktif sebagai warga negara untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila mempertegas konsep bela negara, sebagaimana tertuang dalam TAP MPR Nomor VI Tahun 1973. (Een Irianti & Rini Hardiyanti, 2024).

Menghargai dan menghormati bendera merah hitam Indonesia mencerminkan nasionalisme yang tinggi; mengajarkan lagu Indonesia Raya sebagai wujud nasionalisme. » (Kurniadhi Purnomo, 2017).

Indonesia merasa perlu untuk melampaui batas, atau bahkan bersaing, mengembangkan potensi yang ada di Indonesia, mulai dari sumber daya manusia, teknologi, ekonomi, dan infrastruktur, untuk mampu bersaing dengan Korea. Banyak

remaja yang sebelumnya menyukai Hallyu mulai berubah pikiran dan menyukai hal-hal yang berhubungan dengan Indonesia, sehingga berujung pada sikap nasionalis. dapat dipupuk kembali dan dibuat lebih kuat. (Nadia Restu Utami dkk, 2024).

Nilai-nilai Pancasila harus diperoleh melalui pendidikan formal dan informal untuk memperkuat rasa kebangsaan generasi baru. (Rona Nada Nisrina & Fatma Ulfatun Najicha, 2022). Perlawanan bangsa yang berdasarkan Pancasila dapat dipatahkan apabila budaya lokal tidak dilestarikan, karena hilangnya budaya asli akan menjadikan Indonesia kehilangan jati diri sebagai bangsa. Pemerintah harus mendorong produknya lokal sebagai upaya menumbuhkan rasa bangga terhadap Indonesia dan memantapkan implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, "Persatuan Indonesia" (Nadia Restu Utami dkk, 2024).

Tema kasus yang dibahas kali ini sangat berhubungan dengan data data yang dibahas dalam kasus ini, data yang akan disampaikan langsung dari sumber terpercaya Baru-baru ini marak terdengar fenomena banyaknya warga negara Indonesia (WNI) pindah kewarganegaraan Singapura. Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim. Ia mengatakan, setiap tahunnya sejumlah mahasiswa Indonesia di Singapura berganti kewarganegaraan. Fenomena itu kemudian menuai berbagai pro dan kontra. Menanggapi hal tersebut, Dr Tuti Budirahayu Dra Msi Sosiolog Universitas Airlangga (UNAIR) turut angkat suara. Ia melihat fenomena ini sebagai sebuah fenomena migrasi yang lumrah terjadi. "Ini seperti fenomena migrasi, ya. Dalam migrasi itu kan ada pull factor dan push factor, ada faktor penarik dan pendorong," ujarnya pada Kamis (13/7/2023). (Yulia Rohmawati, 2023)

Menurut Dr Tuti Budirahayu Dra Msi beliau memaparkan bahwa fenomena seperti migrasi atau mahasiswa Indonesia yang beralih menjadi warga negara Singapura sangat lumrah, apalagi dengan adanya fakta ekonomi Singapura lebih maju dan dibandingkan Indonesia yang memang tidak bisa dibandingkan dengan Singapura.

Lebih lanjut, Tuti menerangkan bahwa sebenarnya fenomena pindah kewarganegaraan ini terjadi lantaran adanya faktor penarik dan pendorong. Adanya kesempatan bekerja, berkarier, serta menjalani kehidupan yang lebih baik menjadi faktor pendorong berpindahnya para WNI. "Kalau faktor pendorongnya, saya pikir adanya kesempatan bekerja, berkarier, dan berkehidupan lebih baik dari pada di daerah asal itu sangat mendorong untuk berpindah, ya," terangnya.

Sementara itu, Tuti menyebut kondisi Singapura yang lebih maju dan tertata di berbagai sektor kehidupan, khususnya ekonomi menjadi faktor penarik bagi para WNI. "Faktor penariknya kita bisa lihat, ya, bahwa Singapura adalah negara yang jauh lebih maju, tertata, terkenal memiliki disiplin yang tinggi, dan tentu saja penghasilan yang mereka dapatkan jauh lebih tinggi di sana," lanjutnya. (Yulia Rohmawati, 2023)

Dalam wawancara tersebut bisa kita ketahui bahwa migrasi ini bukan hanya fenomena tanpa adanya penarik dan pendorong, seperti yang sudah di jelaskan dalam wawancara bisa kita kaji bahwa faktor pendorong WNI untuk bermigrasi itu bukan hanya dari diri mereka sendiri tetapi ada faktor seperti kurangnya lapangan kerja di Indonesia, susah berkarier di bidang yang diminati, dan kehidupan yang tidak layak bagi mereka. Dalam hal ini mahasiswa lebih berminat untuk pindah kewarganegaraan karena meski mereka lulus kuliah di Indonesia tidak bisa menjamin kehidupan yang layak dan sesuai

Available at : <http://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/jhn>

dengan usaha yang mereka lalui, dan ada faktor lain seperti di Indonesia memiliki syarat pekerjaan yang lebih susah dan gajinya tidak sebanding dengan jobdesk mereka dibandingkan negara asing yang lebih mudah untuk bekerja asalkan punya kemampuan dalam bidang tersebut.

Bila ada fenomena tertentu pasti ada dampaknya juga jadi dalam wawancara Dr Tuti Menurutnya, jika diaspora Indonesia menempati negara-negara yang lebih maju dan berkontribusi di negara tersebut, maka hal itu seharusnya bisa membantu mendongkrak nama baik Indonesia di mata dunia. "Sebetulnya kalau orang Indonesia banyak bermigrasi ke negara lain yang lebih maju, secara tidak langsung bisa mengangkat nama baik Indonesia. Selain itu, para diaspora itu nanti dapat menerapkan pengetahuan atau keahliannya di Indonesia saat kembali," jelasnya.

Dalam wawancara ini Dr Tuti menyebutkan adanya dampak dari migrasi WNI yang pertama disebutkan bahwa dengan adanya migrasi ini secara tidak langsung bisa mengangkat nama baik Indonesia di kancah nasional dan apabila mereka kembali ke tanah air diharapkan agar dapat menerapkan pengetahuan dan keahliannya di Indonesia. Dalam hal ini kita dapat melihat contohnya yaitu dengan adanya perekrutan menteri, yang merekrut talenta berbakat Indonesia yang sudah berkarir di luar negeri untuk menjadi menteri.

Akan tetapi, Dosen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UNAIR itu tidak menampik adanya kemungkinan dampak negatif yang timbul. "Sisi negatifnya, banyak orang yang bermigrasi tapi tidak memberikan dampak. Artinya mereka tidak membawa daerah asalnya itu lebih maju. Berbagai sektor akhirnya menjadi terabaikan karena kurangnya sumber daya manusia dan semacamnya," imbuhnya. Seperti yang kita ketahui ada dampak positif pasti ada dampak negatifnya, seperti yang di paparkan oleh Dr Tita dengan banyaknya migrasi tidak semuanya akan memberikan dampak, yang artinya itu mereka tidak membawa pengaruh dari menerapkan pengetahuan dan keahliannya di daerahnya yang dampaknya itu ada beberapa sektor keahlian yang kurang akan sumber daya manusia (SDM).

Dengan adanya data tersebut pemerintah memiliki momentum untuk memastikan bahwa Indonesia bisa berkembang dengan baik, dalam hal ini tidak seharusnya pemerintah mengekang. Lantaran, fenomena pindah kewarganegaraan oleh para WNI ini sepenuhnya adalah bagian dari hak asasi manusia. "Sebenarnya itu hak asasi, ya. Tergantung apakah proses pengajuan perpindahan kewarganegaraan itu nanti disetujui atau tidak dari pihak Singapura. Kalau disetujui saya rasa tidak ada masalah," ungkapnya.

Kemudian, Tuti memandang bahwa kemunculan fenomena ini justru menjadi momentum bagi pemerintah untuk berbenah. Ia memandang, fenomena berpindahnya WNI ini mengindikasikan adanya permasalahan struktural yang terjadi di Indonesia. "Masalahnya kalau ini menjadi berbondong-bondong berarti ada sesuatu yang salah di Indonesia. Mungkin saja mereka bermigrasi karena nggak nyaman lagi tinggal di sini. Berarti pemerintah Indonesia tidak memberikan iklim yang baik untuk mereka. Inilah sebetulnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk berbenah," tegasnya.

Dalam dua pernyataan tersebut kita bisa tahu bahwa fenomena ini bukan suatu hal yang bisa dikendalikan dengan paksa, karena Indonesia menjunjung tinggi hak asasi

manusia yang berarti pemerintah tidak mempunyai hak untuk mengendalikan WNI apabila pihak negara lain setuju dengan adanya migrasi ini,

Dengan munculnya fenomena ini justru menjadi momentum bagi pemerintah untuk berbenah karena adanya masalah structural yang terjadi di Indonesia seperti masalah hak warga negara, para WNI ada beberapa yang merasa bahwa tinggal di Indonesia tidak nyaman untuk ditinggali yang mengindikasikan bahwa pemerintah tidak memberikan iklim yang baik bagi para warga negara yang berarti ada sesuatu yang salah dengan sistem pemerintahan.

Fenomena perpindahan kewarganegaraan sejatinya tidak dapat dilepaskan dari kegagalan negara dalam merealisasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan nyata. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, dan layanan publik telah menciptakan jurang antara idealisme Pancasila dengan realitas sosial masyarakat. Di wilayah-wilayah perbatasan, misalnya, warga merasa lebih dekat secara geografis dan emosional dengan negara tetangga yang menawarkan kenyamanan hidup yang lebih baik. Ketika sila ketiga tentang "Persatuan Indonesia" dan sila kelima tentang "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" hanya menjadi slogan tanpa wujud nyata, maka wajar jika sebagian warga merasa tidak lagi memiliki keterikatan emosional terhadap bangsa.

Lebih jauh, proses birokrasi yang rumit dan tidak adil telah memunculkan kekecewaan mendalam yang secara perlahan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap negara. Ketika warga merasa dipersulit oleh sistem, sementara di sisi lain melihat peluang di negara lain lebih terbuka dan bersahabat, maka keputusan untuk bermigrasi bukan lagi semata soal ekonomi, tetapi juga bentuk keputusan terhadap institusi dalam negeri. Di sinilah nasionalisme diuji: bukan oleh slogan, melainkan oleh pelayanan nyata yang dirasakan masyarakat dalam kesehariannya. Pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan negara secara lebih nyata dan adil dalam kehidupan rakyatnya.

Dalam konteks pendidikan, kegagalan mentransformasikan nilai-nilai Pancasila secara relevan dan kontekstual bagi generasi muda juga menjadi sorotan serius. Pelajaran Pancasila yang kaku, hafalan semata, dan tidak kontekstual membuat nilai-nilai luhur tersebut menjadi asing di benak pelajar. Padahal, dalam era digital ini, nilai-nilai kebangsaan perlu dikemas dengan pendekatan yang inovatif, menyentuh kehidupan sehari-hari, dan disampaikan melalui media yang disukai anak muda. Membentuk nasionalisme bukanlah pekerjaan instan, melainkan proses panjang yang harus melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai ekosistem pendidikan yang hidup.

Selain pendidikan, memperkuat kebanggaan terhadap identitas nasional juga dapat dibangun melalui ekonomi kreatif dan kebudayaan lokal. Generasi muda perlu diberi ruang untuk mengekspresikan jati diri bangsa melalui karya-karya kreatif yang berakar pada kearifan lokal. Ketika batik, kuliner, musik tradisional, hingga film lokal mendapat tempat yang layak dan didukung secara serius, maka nasionalisme tidak lagi bersifat simbolik, melainkan konkret dalam bentuk ekonomi dan ekspresi diri. Pemerintah dan pelaku industri perlu bersinergi dalam menciptakan ekosistem budaya yang tidak kalah menarik dari budaya luar.

Akhirnya, diaspora Indonesia tidak seharusnya hanya dilihat sebagai kehilangan warga negara, melainkan sebagai peluang emas dalam membangun jejaring global

Available at : <http://onlinejournal.penacceleration.com/index.php/jhn>

Indonesia. Banyak negara justru membentuk kementerian atau lembaga khusus untuk menjalin hubungan strategis dengan warga negaranya di luar negeri. Indonesia dapat memaksimalkan potensi diaspora sebagai duta budaya, investor, bahkan mitra pembangunan. Jika negara mampu membangun iklim yang ramah untuk pulang dan berkontribusi, maka semangat nasionalisme justru dapat tumbuh di mana pun warga negara berada. Dengan demikian, perpindahan kewarganegaraan bukan semata ancaman, tetapi juga tantangan bagi bangsa untuk introspeksi dan bergerak lebih inklusif ke arah kemajuan.

KESIMPULAN

Fenomena perpindahan kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong dan penarik yang masih relevan hingga saat ini. Faktor pendorong meliputi kondisi ekonomi yang buruk, sulitnya akses transportasi di daerah perbatasan, dan terbatasnya lapangan kerja di Indonesia. Faktor penarik, seperti peluang kerja, pendidikan, dan fasilitas yang lebih baik di negara tujuan, seperti Singapura dan Malaysia, mendorong banyak WNI untuk berpindah kewarganegaraan. Selain itu, globalisasi dan modernisasi juga

menjadi katalis, memberikan peluang karir dan pendidikan baru tetapi juga menyebabkan generasi muda kehilangan identitas budaya dan nasionalisme.

Pengaruh budaya asing, seperti K-pop dan anime, semakin menarik generasi muda untuk beradaptasi dengan budaya luar hingga rela meninggalkan identitas Indonesia. Kurangnya pendidikan nilai-nilai Pancasila turut berkontribusi pada menurunnya rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap bangsa. Hal ini memengaruhi kesadaran bela negara dan implementasi nilai-nilai Pancasila, yang penting untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pemerintah memiliki tantangan untuk meningkatkan rasa nasionalisme melalui pendidikan formal dan informal, serta menciptakan iklim yang mendukung agar WNI merasa nyaman tinggal di tanah air. Fenomena ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk berbenah, mengatasi permasalahan struktural, dan memperbaiki sistem agar lebih inklusif dan mendukung kebutuhan warga negaranya.

Dampak perpindahan kewarganegaraan meliputi sisi positif, seperti peningkatan nama baik Indonesia melalui diaspora, dan sisi negatif, seperti kekurangan sumber daya manusia di sektor tertentu. Fenomena ini menunjukkan perlunya kebijakan strategis untuk mengatasi tantangan nasionalisme dan memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Yulia Rohmawati (2023). Ramai WNI Pindah Kewarganegaraan, Sosiolog UNAIR: Momentum Pemerintah untuk Berbenah. [unair.ac.id](https://unair.ac.id/ramai-wni-pindah-kewarganegaraan-sosiolog-unair-momentum-pemerintah-untuk-berbenah).
<https://unair.ac.id/ramai-wni-pindah-kewarganegaraan-sosiolog-unair-momentum-pemerintah-untuk-berbenah>
- Nadia Restu Utami , Nova Fitria Maharani , Ilham Hudi , Nurpadila , Sartika Agus Rianti , Verti Nofita Sari , Yolipia Amanda (2024). Analisis Literatur Penyebab

Generasi Muda Indonesia Pindah Kewarganegaraan Dan Kewajiban Terhadap Perspektif Bela Negara. JURNAL PENDIDIKAN. 3(1), 1-9.

Een Irianti & Rini Hardiyanti (2023), KOREAN WAVE DALAM PERSPEKTIF IMPERIALISME BUDAYA (Analisis Dampak Menonton Drama Korea Pada Sikap Nasionalisme Remaja Studi Kasus Komunitas K-Drama Lovers di Kota Tangerang), 1(1), 111-116.

Rona Nada Nisrina & Fatma Ulfatun Najicha (2022), PENGARUH KOREAN WAVE TERHADAP KETAHANAN NASIONALISME WARGA INDONESIA, Jurnal Kewarganegaraan, 6(2), 2384-2392.

Kurniadhi Purnomo, (2017), Makna Nasionalisme Masyarakat Perbatasan Dalam Film Tanah Surga katanya, (Skripsi, Universitas Sebelas Maret).